

**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP
KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DI BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Oleh :

Nurul Izzah

Email : azizahnurulizzah21@gmail.com

Pembimbing I :

Firman Menne

Email : firman@universitasbosowa.ac.id

Pembimbing II :

Arifuddin Mane

Email : arif.bosowa45@gmail.com

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRACT

NURUL IZZAH. 2018. *Essay. The Influence of Organizational Behavior Factors Against the Use of Regional Financial Accounting Systems in the Food Security Agency of South Sulawesi Province guided by Dr. Firman Menne, SE, M.Sc., AK., CA. and Dr. HA Arifuddin Mane, SE, M.Si., SH, MH.*

The purpose of this study was to analyze the influence of organizational behavior factors (training, clarity of purpose, and support from superiors) on the partial use of regional financial accounting systems.

The object of research is the Food Security Agency of South Sulawesi Province. Data collection method uses questionnaire. The data analysis method used is descriptive analysis.

The results showed that training and support from superiors had no effect on the usefulness of the regional financial accounting system, while the objective clarity variable had an influence on the usefulness of the regional financial accounting system. Therefore, to improve the effectiveness of a good company, the agency must provide training so that employees can understand correctly about the system and need support from superiors or the involvement of superiors in the progress of the project and provide the necessary resources.

Keywords: *Organizational Behavior Factors (Training, Clarity of Purpose, Support of Bosses), and the Use of Regional Financial Accounting Systems.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *powershare* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengembalian keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*. Reformasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang harus diterima dan diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami perubahan yang besar. Bentuk laporan pertanggungjawaban sebelumnya hanya berupa laporan perhitungan APBD, saat ini laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Organisasi pada pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap / barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang digunakan pada saat sekarang ini adalah sistem akuntansi yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendagri No.13/2006 yang kemudian direvisi pada Permendagri No.59/2007 dan direvisi kembali pada Permendagri No.21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan.

Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut (Latifah : 2007), diantaranya adanya kejelasan tujuan suatu organisasi serta adanya dukungan atasan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik, karena SAKD dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui apakah pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut peraturan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”. (Pasal 70 : ayat 1)

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 mengemukakan: “Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer” (Pasal 23 : ayat 1).

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2002), implementasi sistem akuntansi di daerah bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Untuk kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri.
2. Untuk kebutuhan pemerintah lebih tinggi.
3. Untuk kepentingan masyarakat umum.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel. Indikator yang digunakan dalam mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut diadopsi dari Nurlaela (2010) adalah sebagai berikut:

1. *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.
2. *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya.
3. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya.
4. Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

Faktor Keperilakuan Organisasi

Menurut Chenhall (2004) dalam (Nurlaela dan Rahmawati 2010), faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, Kejelasan Tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem.

METODE PENELITIAN

Regresi berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + p_1X_1 + p_2X_2 + p_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Efektivitas Pengendalian Anggaran

α = Konstanta

$P_{1,2,3}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Pelatihan

X_2 = Kejelasan Tujuan

X_3 = Dukungan Atasan

e = Epsilon (variabel-variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (parsial) dan uji R^2 (determinasi). Sebelum proses analisis regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian (kuesioner dengan uji validitas dan reliabilitas serta asumsi klasik).

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengoperasionalkan konstruk sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara pengukuran konstruk yang lebih baik (Bambang dan Nur Indriantoro, 2002).

Definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Variabel Independen

Sugiyono (2017:39) menyatakan bahwa variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor berperilaku yang terdiri dari:

1) Pelatihan (X1)

Pelatihan adalah usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem. Indikator sebagai berikut: Keterampilan kerja, jenis penelitian, pelatihan diberikan dengan jelas, cara-cara spesifik, fasilitas pelatihan, jenis penelitian sesuai dengan bidang, pengembangan kemampuan dan pengarahan atau pelatihan.

2) Kejelasan Tujuan (X2)

Kejelasan tujuan adalah kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. Indikator sebagai berikut: Kejelasan dari tugas-tugas, kejelasan dari tujuan organisasi, patuh dan loyal, memahami tujuan dari pekerjaan dan pencapaian tujuan.

3) Dukungan Atasan (X3)

Dukungan atasan adalah keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan. Indikator sebagai berikut: memberikan wewenang, memberikan dukungan pada setiap keputusan, melaksanakan pekerjaan dengan baik, menghargai pendapat, kebebasan dalam mendiskusikan masalah, kepercayaan, kebebasan dalam berpendapat, perhatian dan menerima dukungan atasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Amirullah No. 1, Maricaya Sel., Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Badan Urusan Ketahanan Pangan (BUKP) dibentuk melalui Kepres No. 136 tahun 1999 yang diharapkan dapat terorganisasi dengan lebih baik. Penjabaran Kepres tersebut terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen Pertanian yang diuraikan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 160/Kpts/OT.210/3/2000 tata kerja Departemen Pertanian, Badan Usaha Ketahanan Pangan pada Bab XII pasal 140. Melalui keputusan tersebut dikemukakan bahwa, badan ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUKP dan Sekretariat Pengendali (Setdal) BIMAS dilebur menjadi Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 pasal 16 tentang susunan organisasi dan tugas Departemen Pertanian. Kepres tersebut menjelaskan bahwa BBKP merupakan suatu unit kerja setingkat eselon I dalam struktur Departemen Pertanian dengan tugas yang diuraikan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian yaitu “Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan”. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas pemantapan ketahanan pangan di daerah, telah dibentuk unit kerja struktural ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

Visi dan Misi Instansi

1. Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Badan Ketahanan Pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

2. Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.
- 2) Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.
- 3) Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- 4) Mewujudkan pangan segar dan aman dan bermutu.

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda tiga prediktor dengan dependen kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y1). Persamaan regresi berganda tiga prediktor ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel pelatihan (X1), kejelasan tujuan (X2), dan dukungan atasan (X3) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y1), yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + P_1X_1 + P_2X_2 + P_3X_3 + e$$

Berikut adalah hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 17 :

TABEL 1
HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA
Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.427	4.177		3.454	.002
Pelatihan	.120	.177	.138	.680	.502
Kejelasan Tujuan	.772	.273	.855	2.832	.008
Dukungan Atasan	-.209	.172	-.280	-1.217	.233

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.427	4.177		3.454	.002
Pelatihan	.120	.177	.138	.680	.502
Kejelasan Tujuan	.772	.273	.855	2.832	.008
Dukungan Atasan	-.209	.172	-.280	-1.217	.233

a. Dependent Variable: KSAKD

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 14,427 + 0,120X_1 + 0,772X_2 + (-0,209X_3) + e$$

$$\text{Nilai } e = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,520} = \sqrt{0,48} = 0,692$$

Sehingga didapatkan persamaan regresi:

$$Y = 14,427 + 0,120X_1 + 0,772X_2 + (-0,209X_3) + 0,692$$

Nilai e sebesar 0,692 merupakan *variance* variabel kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan.

Uji Hipotesis (Uji T)

Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Jika sig. > 0,05 maka Ho diterima, tetapi jika sig. < 0,05 maka Ho ditolak. Uji hipotesis membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada uji 2 sisi dan tingkat signifikansi 5% dengan persamaan sebagai berikut:

$$t_{tabel} = n - k - 1 ; \alpha/2$$

$$= 35 - 3 - 1 ; 0,05/2$$

$$= 31 ; 0,025$$

$$= 2,03951$$

1. Hasil uji SPSS 17 pada variabel pelatihan (X1) diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,680 < t_{tabel} 2,0395$ dengan nilai sig. $0,502 > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Hasil uji SPSS 17 pada variabel kejelasan tujuan (X2) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,832 > t_{tabel} 2,03951$ dengan nilai sig. $0,008 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Hasil uji SPSS 17 pada variabel dukungan atasan (X3) diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,217 < t_{tabel} 2,03951$ dengan nilai sig. $0,223 > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah untuk melihat besarnya pengaruh variable X terhadap variable Y. Kita dapat berpedoman pada nilai R Square (R^2) model summary.

TABEL 2
HASIL UJI R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.563	.520	2.71367

a. Predictors: (Constant), Dukungan Atasan, Pelatihan, Kejelasan Tujuan

b. Dependent Variable: KSAKD

Berdasarkan output model summary, diketahui nilai koefisien (R Square) sebesar 0,563 (nilai 0,563 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu $0,750 \times 0,750 = 0,563$). Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0,563 sama dengan 56,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan berpengaruh terhadap prestasi sebesar 56,3%. Sedangkan sisanya ($100\% - 56,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar

model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering disebut sebagai error (e). Untuk menghitung nilai error dapat digunakan rumus $e = 1 - R^2$.

Berdasarkan analisis regresi dan hasil uji t , diketahui bahwa hanya variabel kejelasan tujuan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara empiric hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliana (2012), Hasil penelitian seharusnya dapat memperjelas arti penting dari program pelatihan untuk menguasai sistem akuntansi yang digunakan di Badan Ketahanan Pangan. Dengan adanya panduan dan pelatihan langsung oleh tenaga ahli yang berpengalaman tentu akan sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan karyawan dalam memanfaatkan sitem informasi, serta dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji SPSS 17 pada variabel pelatihan (X_1) diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,680 < t_{tabel} 2,0395$ dengan nilai sig. $0,502 > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Hasil uji SPSS 17 pada variabel kejelasan tujuan (X_2) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,832 > t_{tabel} 2,03951$ dengan nilai sig. $0,008 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Hasil uji SPSS 17 pada variabel dukungan atasan (X_3) diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,217 < t_{tabel} 2,03951$ dengan nilai sig. $0,223 > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan sistem

akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan. 2018. Sejarah. bkp.pertanian.go.id/blog/post/sejarah. Diakses tanggal 20 Mei 2018.
- Bambang Supomo dan Nur Indrianto. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Penerbit BFEE UGM.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Kayati. 2016. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Madiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.
- Nurlaela, Siti dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. Jurnal SNA XIII
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Akuntansi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. 2015. *Perilaku Dalam Organisasi*, Cetakan Ketiga. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Yuliana, Risna. 2012. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Skripsi. Padang: Universitas Bung Hatta.

